

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA SORONG

Aswad Muhdar¹⁾ dan Abu Sofyan²⁾

^{1,2)} Universitas Muhammadiyah Sorong
aswad@um-sorong.ac.id¹⁾

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja, penyebab terjadinya bencana banjir serta upaya yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Sorong. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana daerah di Kota Sorong sudah di lakukan sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang ada. Tetapi dalam menanggulangi bencana banjir ada beberapa penyebab banjir yang belum mendapat solusi yang tepat dari pemerintah yaitu Galian C dan sampah yang berserakan di mana-mana. Upaya yang di lakukan oleh pihak BPBD untuk mengatasi bencana banjir yaitu dengan melakukan sosialisasi ke pada masyarakat untuk siap siaga dalam menyelamatkan diri apabila terjadi bencana.

Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan, Bencana Banjir Di Kota Sorong.

PENDAHULUAN

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian banjir yaitu Berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”, Undang- undang Republik Indonesia No. 24

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, peraturan presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43),

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan Lembaga asing non Pemerintah dalam penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44).

Sejalan dengan tujuan konstitusi yang telah disebutkan di atas, maka suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana yang dimuat pada suatu lingkup manajemen bencana yang efektif dan efisien, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir memang tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja yaitu pemerintah, akan tetapi semua pihak harus aktif berperan termasuk masyarakat pun harus berpartisipasi dalam

penanganan masalah banjir ini.

Kota Sorong merupakan salah satu kota di Wilayah Provinsi Papua Barat yang terletak berbatasan dengan pesisir pantai. Sesuai dengan fenomena yang sering terjadi di masa sekarang ini yaitu banjir terjadi dimana-mana yang menyebabkan masyarakat setempat merasa khawatir ketika hujan deras melanda kota Sorong yang menyebabkan sejumlah wilayah di kepung banjir setinggi pinggang orang dewasa. Sejumlah ruas Jalan di Kota Sorong seperti Jalan Basuki Rahmat KM.9 dan KM.10 tak terkecuali Sungai Maruni, Kampung Bugis, dan belakang Mega yang selalu menjadi langganan banjir ketika di guyur hujan.

Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain.

Banjir menyebabkan berbagai macam resiko, di antaranya yaitu: rumah warga menjadi kotor, adanya korban jiwa, korban materi, warga terserang berbagai macam penyakit (penyakit kulit, diare, dan lain-lain), rusaknya bangunan-bangunan, macetnya kegiatan ekonomi warga, jalan berlubang, bahkan hingga trauma yang dialami oleh warga masyarakat, dan lain-lain.

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Sorong diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Atas dasar dari peristiwa-peristiwa bencana banjir yang terjadi di Daerah Kota Sorong, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kinerja BPBD Kota Sorong selaku instansi atau lembaga pemerintah

yang bergerak di sector bidang penanggulangan bencana.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja dalam pengertiannya di artikan sebagai prestasi yang diperlihatkan dalam kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan Lijan Poltak Sinambela (2014:140), mengemukakan bahwa kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (*benefit*) dan terdapat adanya rangsangan (*inducement*) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (*reasonable*)

Sementara itu Mangkunegara (2006:9), mengemukakan kinerja (prestasi kerja) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Keban (2003:43), menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil (*the degree of accomplishment*) atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Sedangkan Muhammad Mahsun (2006:25), berpendapat bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Sedarmayanti dalam bukunya mengenai pengembangan kepribadian pegawai (2004:176) dikatakan bahwa

kinerja: Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.

Moeheriono (2010:60), mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Simanjuntak (2005:3) mengemukakan bahwa kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di organisasi tersebut.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong

royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bencana merupakan kejadian paling mengerikan di muka bumi karena bencana umumnya menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak akibat terjadinya bencana alam:

1. Dampak terhadap lingkungan Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan misalnya belerang akibat letusan gunung berapi dapat merusak tanah dan mencemari air karena dapat meningkatkan kadar asam air maupun tanah. Aliran air akibat banjir di daratan juga dapat mengikis lapisan *top soil* lahan pertanian maupun perkebunan sehingga lahan akan terdegradasi.
2. Dampak terhadap infrastruktur Bencana alam dalam skala besar dapat menyebabkan rusaknya prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan kerugian berupa kehilangan harta benda yang tak sedikit jumlahnya.
3. Dampak terhadap kehidupan Bencana alam memang tidak dapat diduga kapan dan dimana terjadinya sehingga tak heran jika menyebabkan banyak korban jiwa. Beberapa bencana alam yang sangat dahsyat bahkan dapat memakan jutaan korban jiwa, tidak hanya manusia bencana alam juga mengakibatkan matinya banyak hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri dari bencana alam.

4. Dampak terhadap perekonomian Bencana alam menimbulkan banyak kerusakan yang dapat mempengaruhi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, akibatnya pembangunan perekonomian akan terhambat. Selain itu, bencana alam akan menyebabkan kelangkaan sumber daya sehingga akan timbul berbagai masalah dalam perekonomian suatu negara. Bencana alam juga dapat mempengaruhi harga komoditas

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode kualitatif terdapat beberapa sumber data. Sumber data tersebut dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip. Menurut Brannen, Julia, (2005:50).

Analisa data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagian temuan bagi orang lain. Analisis data adalah proses pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, (2013:244) Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong

Kinerja BPBD dalam menanggulangi bencana banjir Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Ibu (HS) selaku kepala pelaksana BPBD, beliau mengatakan bahwa:

“BPBD ini merupakan instansi teknis artinya penanggulangan bencana bukan saat terjadi bencana saja kita bekerja tetapi sebelum bencana BPBD mempunyai tanggung jawab besar untuk mengajak masyarakat bisa mengantisipasi terjadinya bencana jadi yang di lakukan sebelum terjadinya bencana yaitu melakukan sosialisasi edukasi ke pada masyarakat bagaimana supaya mereka tanggap bencana mempersiapkan masyarakat sedini mungkin untuk mewaspadai jika terjadi bencana alam maupun non alam, kemudian jika terjadi bencana maka tugas BPBD adalah menanggulangi kejadian bencana tersebut dengan cara melakukan pendataan tentang kerusakan yang terjadi, korban jiwa akibat dari bencana itu, setelah kejadian bencana maka yang di lakukan oleh BPBD adalah melakukan rekonstruksi (memperbaiki semua kerusakan), setelah itu kembali lagi dengan sosialisasi mengembalikan traumatik”. (Wawancara pada tanggal, 6 November 2020).

Upaya-upaya yang di lakukan BPBD dalam meningkatkan kinerja pegawai, kembali lagi di ungkapkan Ibu (HS) selaku kepala pelaksana BPBD bahwa:

“untuk meningkatkan kinerja pegawai tentu ada banyak cara yang kita lakukan misalnya dengan memberikan motivasi berupa intensif

bisa juga berupa promosi terhadap pegawai jadi jika dia kerja baik dia bisa naik di jabatan di atasnya, selain itu juga insentif yang berupa penghargaan di berikan ketika dia bisa melakukan kinerja yang baik, dengan penghargaan misalnya berupa anggaran atau honor insentif, bagi yang rajin. Selain itu bagi pegawai yang malas tahu harus di berikan sangsi bisa berupa peringatan agar supaya mereka bisa sadar tidak lagi melakukan kesalahan dan lebih di siplin lagi”. (Wawancara pada tanggal, 6 November 2020)

Upaya BPBD Untuk Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Sorong.

Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan baik dan serius. Maka dari itu strategi jitu dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan penanggulangan Bencana daerah Kota Sorong sangat di harapkan.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak AP selaku kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam Penanggulangan bencana Banjir kami mengadakan sosialisasi ke pada masyarakat sebelum terjadi bencana banjir masyarakat di himbau untuk siap siaga dalam menyelamatkan diri dan surat-surat penting apa bila hujan deras yang di duga dapat mengakibatkan banjir, kemudian menghimbau semua masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan untuk pemerintah mempertimbangkan

kembali galian-galian C yang merupakan salah satu penyebab banjir untuk di berhentikan, melakukan penghijauan di lokasi-lokasi yang kosong dan memperbaiki saluran-saluran pembuangan air”. (Wawancara pada tanggal, 8 Oktober 2020).

KESIMPULAN

Banjir di kota Sorong di sebabkan oleh adanya galian C dan sampah- sampah plastik yang menimbun saluran pembuangan air yang menyebabkab air meluap ke jalan raya bahkan merendam rumah masyarakat yang rendah.

Upaya BPBD dalam menanggulangi banjir yaitu mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan atau memperbaiki saluran pembuangan air. Di harapkan pemerintah kota Sorong dapat menimbang kembali untuk membatasi galian C yang merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Dinamika Reformasi dan revitalisasi Administrasi Publik Indonesia*. Suara Bebas: Jakarta.
- Ayan E. Jordan. 2002. *Bengkel kreatifitas*. Kaifa: Bandung.
- Creech, Bill. 1996. *Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu (TQM): Cara Membuat Total Quality Management Bekerja Bagi Anda*. Binarupa Aksara: Jakarta.
- Gibson, Ivancevich Donnelly. 1997. *Organisasi: Prilaku Struktur Proses*. Binarupa Aksara: Jakarta.

- Keban, Jeremias T. 2003. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen Dan Kebijakan*. FISIPOL UGM: Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1996. *Meningkatkan Kinerja BUMN: Antispasi Terhadap Kompetensi Dan Kebijakan Deregulasi*. JKAP No. 1: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. FE UGM: Yogyakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Mangkunegara, Prabu Anwar. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moeheriono. 2010. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktek*. Grasindo: Jakarta.
- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Alfabeta: Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung